

Sentimen Negatif atas Kebijakan Prabowo Subianto dalam Komentar pada Akun Instagram Folkative

Khoirun Nisa¹

Sri Yanuarsih²

I Wayan Letreng³

¹²³ Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

¹nisakhoirun2729@gmail.com

²sriyanuarsih1@gmail.com

³wletreng@gmail.com

Abstrak

Sentimen negatif merupakan pandangan, emosi, atau sikap yang kurang baik terhadap suatu topik, produk, maupun layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksantunan berbahasa dalam komentar warganet pada akun Instagram Folkative terkait kebijakan Prabowo Subianto, dengan menggunakan teori ketidaksantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Culpeper (1996) yaitu (1) ketidaksantunan secara langsung, (2) ketidaksantunan positif, (3) ketidaksantunan negatif, (4) sarkasme atau kesantunan semu, (5) menahan kesantunan. Fokus penelitian adalah untuk memahami pola ketidaksantunan tersebut dalam konteks interaksi digital, khususnya pada unggahan tentang kebijakan pemerintah di Instagram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi digital. Data berupa komentar yang mencerminkan ketidaksantunan berbahasa yang diambil dari unggahan populer Folkative mengenai kebijakan Prabowo Subianto pada periode November 2024 yang membahas tiga kebijakan utama, yaitu Investasi Luar Negeri, Kenaikan Gaji Guru, dan Program Makan Bergizi Gratis. Data dianalisis melalui pendekatan tematik untuk menemukan pola utama ketidaksantunan serta pendekatan pragmatik untuk memahami konteks dan makna komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ketidaksantunan berbahasa yang paling dominan adalah ketidaksantunan negatif, diikuti dengan sarkasme dan ketidaksantunan langsung. Komentar warganet banyak berisi kritik frontal, ejekan, serta sindiran sinis terhadap kebijakan pemerintah. Faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut meliputi skeptisisme terhadap transparansi kebijakan, ketidakpercayaan pada janji politik, serta kebebasan berekspresi di media sosial yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik tanpa batasan etika. Peneliti menyimpulkan bahwa ketidaksantunan berbahasa di media sosial mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena ini menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran etika komunikasi di ruang digital guna menciptakan interaksi yang lebih sehat dan konstruktif. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika komunikasi digital yang relevan dalam memahami hubungan antara masyarakat dan kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong perlunya penguatan literasi digital untuk meminimalisasi ketidaksantunan dalam komunikasi daring, sehingga tercipta ruang diskusi yang lebih positif dan produktif.

Kata kunci: *Sentimen Negatif, Komentar, Instagram*

Abstract

Negative sentiment is a less favorable view, emotion, or attitude toward a topic, product, or service. This study aims to identify impoliteness in netizens' comments on the Instagram account Folkative regarding Prabowo Subianto's policies, using the theory of impoliteness proposed by Culpeper (1996), namely (1) direct impoliteness, (2) positive

impoliteness, (3) negative impoliteness, (4) sarcasm or pseudo-politeness, and (5) withholding politeness. The research focus is to understand these patterns of incivility within the context of digital interaction, specifically in posts about government policies on Instagram. This research uses a descriptive qualitative method with digital observation techniques. The data consists of comments reflecting impolite language taken from Folkative's popular upload regarding Prabowo Subianto's policies in November 2024, which discusses three main policies: Foreign Investment, Teacher Salary Increase, and the Free Nutritious Meals Program. Data were analyzed thru a thematic approach to identify the main patterns of impoliteness, as well as a pragmatic approach to understand the context and meaning of communication. The research results show that the most dominant form of linguistic impoliteness is negative impoliteness, followed by sarcasm and direct impoliteness. Netizens' comments are filled with direct criticism, mockery, and cynical sarcasm toward government policies. Factors underlying this phenomenon include skepticism toward policy transparency, distrust in political promises, and freedom of expression on social media, which allows the public to voice criticism without ethical constraints. Researchers concluded that uncivil language on social media reflects public dissatisfaction with government policies. This phenomenon highlights the importance of raising awareness about ethical communication in the digital space to create healthier and more constructive interactions. This research provides insights into the dynamics of digital communication relevant to understanding the relationship between society and government policy, while also highlighting the need to strengthen digital literacy to minimize incivility in online communication, thus creating a more positive and productive space for discussion.

Keywords: *Negative Sentiment, Comments, Instagram*

Pendahuluan

Media sosial telah menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan, ide, maupun kritik terhadap isu sosial dan politik. Salah satu platform yang paling banyak digunakan adalah Instagram, yang memungkinkan warganet untuk berkomentar langsung pada unggahan akun publik. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kebebasan berekspresi, tetapi juga sering menimbulkan persoalan etika komunikasi, khususnya dalam bentuk ketidaksantunan berbahasa (Suryani et al., 2021)

Salah satu akun Instagram populer di Indonesia yang berperan sebagai wadah eksplorasi budaya kreatif masyarakat Indonesia, dengan fokus pada generasi muda adalah akun Folkative. Folkative menyajikan beberapa konten menarik seperti konten informatif dan menghibur, seputar seni, budaya lokal, dan fenomena sosial. Dalam setiap konten yang diunggah oleh Folkative terdapat ciri khas gaya komunikasi yang kekinian, *relate, up to date, to the point*, baik dan mudah di terima langsung oleh pengguna Instagram lainnya. Konten yang disajikan dikemas dengan kalimat pendek yang hanya menjelaskan inti dari informasi, sehingga membuat generasi muda tertarik untuk mengikuti akun Folkative. Dengan gaya penyampaian yang ringan, Folkative membangun komunitas digital yang aktif, dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan pandangan dan ide mereka (Marzella, Rizal, 2024).

Folkative membahas topik-topik yang mencakup berbagai aspek kehidupan di antaranya masyarakat urban, kritik sosial, dan humor sarkastik. Meskipun gaya penyampaiannya terlihat santai dan ringan, beberapa konten Folkative mengandung tema sensitif yang menyentuh nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia. Dengan itu Folkative mampu membuka ruang diskusi yang mendalam tanpa terkesan berat dan kaku. Konten Folkative juga memiliki potensi untuk memicu respon kritis dari pembaca, karena

menyajikan kritik sosial dan isu kontroversial, bagi mereka yang merasa pandangannya terpengaruh oleh pesan yang disampaikan.

Di media sosial Instagram, pengguna umumnya memiliki kebebasan berekspresi dalam berbahasa, termasuk penggunaan bahasa informal atau slang. Kebebasan ini membuka ruang bagi kreativitas untuk berkomunikasi dengan santai. Namun, seiring dengan fleksibilitas tersebut, pengguna juga perlu memiliki kesadaran etis, mengingat potensi timbulnya kesalahpahaman, terutama ketika berhadapan dengan topik sensitif. Dalam lingkungan yang terbuka seperti media sosial Instagram, etika berkomunikasi menjadi faktor penting untuk menciptakan ruangan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna, agar dapat saling berinteraksi tanpa rasa terancam atau terganggu (Siregar et al., 2024).

Dalam konteks politik Indonesia, kebijakan publik yang diambil oleh seorang pemimpin sering kali menjadi perhatian utama masyarakat, terutama di media sosial. Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, merupakan salah satu tokoh yang sering menjadi subjek diskusi di kalangan warganet, baik secara positif maupun negatif (Shafari, Mardiningsing, 2020). Popularitas media sosial seperti Instagram telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung, tanpa batasan waktu dan tempat (Salsabila, 2024). Kritik dan sentimen negatif yang sering kali muncul di platform ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan individu, tetapi juga menggambarkan opini kolektif terkait isu tertentu yang dianggap relevan oleh masyarakat luas (Muhammad et al., 2024). Fenomena ini menjadi penting untuk dipelajari, mengingat media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai alat partisipasi politik yang memengaruhi dinamika opini publik dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Respons negatif yang muncul dalam bentuk komentar-komentar di media sosial tidak hanya mencerminkan kebebasan berekspresi masyarakat, tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana etika berkomunikasi sering kali terabaikan dalam interaksi digital. Salah satu bentuknya adalah ketidaksantunan berbahasa, yang menjadi fokus dalam banyak penelitian terkait dinamika komunikasi di ruang digital (Andi Saadillah et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan bagaimana platform seperti Instagram tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga arena untuk menyampaikan kritik yang dapat mengarah pada bentuk ketidaksantunan berbahasa. Respon negatif dapat diidentifikasi dari ketidaksantunan berbahasa.

Ketidaksantunan berbahasa merupakan pelanggaran terhadap aturan yang disepakati dalam interaksi sosial. Saat menyampaikan informasi seseorang perlu memperhatikan norma budaya yang ada. Jika cara berkomunikasi tidak sesuai dengan norma tersebut, orang lain dapat memberi penilaian negatif atau menganggapnya tidak berbudaya (Wulandari, 2016). Secara teoritis, penelitian ini merujuk pada konsep strategi ketidaksantunan berbahasa yang dikemukakan oleh Culpeper (1996), meliputi: Pertama, ketidaksantunan secara langsung (*bald on record impoliteness*), yang melibatkan tindakan langsung untuk mengancam muka subjek atau objek tuturan dengan cara yang jelas, ringkas, dan tidak ambigu, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap muka. Kedua, ketidaksantunan positif (*positive impoliteness*), yang digunakan untuk merusak muka positif target tuturan, seperti mengabaikan, menghina, atau menggunakan bahasa yang tidak tepat atau merendahkan identitas lawan bicara. Ketiga, ketidaksantunan negatif (*negative impoliteness*), bertujuan untuk merusak muka negatif dengan cara menakut-nakuti, mengejek, menghina, atau meremehkan target, serta tidak memperlakukan mereka dengan serius. Keempat, sarkasme atau kesantunan semu (*sarcasm or mock politeness*), yang melibatkan penyampaian yang tampak sopan di permukaan, namun

sebenarnya tidak tulus atau berpura-pura. Kelima, menahan kesantunan (*withhold politeness*), yang berarti pelaku sengaja tidak melakukan tindakan kesantunan yang diharapkan, seperti tidak mengucapkan terima kasih atau selamat (Ratnawati, 2023). Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana warganet menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah melalui komentar di Instagram.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan kecenderungan serupa. (Irawati, 2023) dalam penelitian berjudul "*Strategi Ketidaksantunan Sarkasme Warganet pada Kolom Komentar Instagram Ganjar Pranowo*" yang mengidentifikasi strategi sarkasme serta penanda ketidaksantunan yang muncul dalam komentar warganet pada akun Instagram Ganjar Pranowo. Penelitian tersebut menemukan bahwa sarkasme digunakan dalam bentuk majas ironi dengan tujuan menghina atau menyindir secara tersirat. Empat penanda ketidaksantunan yang ditemukan meliputi, diksi umpatan, penggunaan huruf kapital, tanda seru yang berlebihan, serta panggilan tidak pantas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa warganet cenderung menggunakan strategi ini dalam menanggapi isu politik, sepak bola, dan agama.

(Wildan, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul "*Sentimen Negatif Netizen dalam Kolom Komentar detik.com terhadap Pemberitaan Kasus Ferdy Sambo*" menganalisis bagaimana masyarakat mengekspresikan sentimen negatif melalui komentar di situs detik.com terkait kasus Ferdy Sambo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis data berdasarkan fakta bahasa berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dari data yang terkumpul selama periode Juli hingga November 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif netizen didominasi oleh penggunaan kata kasar, sindiran, dan ungkapan kemarahan yang tidak hanya ditujukan kepada Ferdy Sambo, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan dua penelitian sebelumnya. Penelitian pertama oleh (Irawati, 2023) menemukan bahwa sarkasme mendominasi komentar warganet dalam menanggapi isu politik pada akun Instagram Ganjar Pranowo, sementara (Wildan, 2023) menunjukkan bahwa sentimen negatif di kolom komentar detik.com mengenai kasus Ferdy Sambo didominasi oleh penggunaan kata kasar, ejekan, dan ungkapan kemarahan. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa media sosial sering menjadi arena ekspresi ketidakpuasan publik. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji komentar warganet pada akun non-politik seperti Folkative, yang justru kerap menjadi ruang pertemuan antara budaya populer dan isu politik. Inilah yang menjadi celah penelitian dari studi ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk ketidaksantunan berbahasa berdasarkan teori Culpeper (1996) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya komentar negatif tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika komunikasi digital, sekaligus menekankan pentingnya literasi digital dalam mendorong terciptanya diskusi politik yang lebih sehat di ruang media sosial

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena berfokus pada deskripsi fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam komunikasi digital. (Aviva & Mulyani, 2022) mengungkapkan bahwa metode deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan fenomena sosial berdasarkan data berupa kata, frasa, atau kalimat tanpa manipulasi variabel, sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Sumber data berasal dari komentar warganet pada akun Instagram Folkative yang menanggapi

unggahan terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto pada periode 23–30 November 2024. Komentar dipilih karena mencerminkan ekspresi spontan publik terhadap isu politik dalam ruang digital yang terbuka.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi digital, yaitu pengamatan langsung pada kolom komentar unggahan akun Folkative. Observasi digital memungkinkan peneliti memperoleh data autentik yang relevan dengan konteks komunikasi daring (Yusuf & Ahmadi, 2022). Data dikumpulkan melalui tangkapan layar dan pencatatan sistematis, kemudian diseleksi berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu relevansi dengan topik kebijakan Prabowo, keterlihatan bentuk ketidaksantunan, dan tingkat popularitas komentar. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument* yang berperan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis data. Untuk membantu sistematisasi, digunakan tabel kategorisasi komentar berdasarkan strategi ketidaksantunan menurut teori Culpeper (1996).

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan dua pendekatan, yakni Analisis Tematik dan Analisis Pragmatik, yang memberikan pemahaman mendalam mengenai ketidaksantunan dalam komentar digital. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang menonjol dalam komentar-komentar yang menunjukkan ketidaksantunan. Langkah-langkahnya meliputi pengelompokan komentar ke dalam kategori tertentu, seperti sarkasme, penghinaan, atau penggunaan bahasa kasar. Sedangkan, Analisis pragmatik dilakukan untuk memahami bagaimana konteks komunikasi memengaruhi makna dari ketidaksantunan dalam komentar (Rizal Sukandi et al., 2022). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan deskripsi mendalam mengenai bentuk ketidaksantunan berbahasa warganet dalam menanggapi kebijakan pemerintah di media sosial, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil

Penelitian ini berhasil mengumpulkan data pada tanggal 23, 27, dan 30 November 2024. Dari data tersebut, ditemukan berbagai bentuk ketidaksantunan dalam komentar pada unggahan akun Instagram Folkative, yang terkait dengan beberapa kebijakan yaitu:

1. Kebijakan Investasi dari Luar Negeri
2. Kebijakan Kenaikan Gaji Guru
3. Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Kebijakan Investasi dari Luar Negeri

Postingan pada akun Instagram Folkative **“Presiden Prabowo bawa ‘oleh-oleh’ investasi Rp 294 T dari luar negeri.”** 23 November 2024, menjadi salah satu isu yang ramai dibicarakan publik di media sosial. Unggahan akun Instagram Folkative mengenai kebijakan ini mendapat ribuan komentar dengan respon yang beragam. Sebagian kecil warganet menilai kebijakan tersebut sebagai peluang positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun, mayoritas komentar justru bernuansa kritis dan sinis, terutama terkait transparansi dana, potensi utang, serta kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan ekonomi strategis pemerintah dapat memicu respons emosional yang kuat di ruang digital. Komentar-komentar warganet tidak hanya sekadar opini, tetapi sering kali disampaikan dalam bentuk bahasa yang tidak santun, baik berupa ejekan, sindiran, maupun tuduhan. Analisis berikut mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa yang muncul pada

unggahan terkait kebijakan investasi luar negeri, sesuai dengan kategori teori Culpeper (1996).

Tabel 1. Kebijakan Investasi dari Luar Negeri

No	Komentar	Ketidaksantunan	Penjelasan
		n	
1	@erikpriansyah13: alah ngutang banyak gaya	Ketidaksantunan negatif	Mengkritik pengelolaan kebijakan dengan nada merendahkan.
2	@adhiegr: Investasi apa pinjol? 😂	Sarkasme atau kesantunan semu	Menggunakan perbandingan dengan “pinjol” untuk merendahkan kebijakan.
3	@icemosss: Nambah lagi aja utang negara.	Ketidaksantunan negatif	Kritik tajam terhadap kebijakan fiskal tanpa solusi.
4	@rizanlfh: anjay	Menahan kesantunan	Tidak ada apresiasi atau argumen, hanya menyampaikan ejekan singkat.
5	@jajang_nurjaman31: Lah beda tipis ama korupsi 271 T	Ketidaksantunan negatif	Tuduhan eksplisit yang membandingkan investasi dengan korupsi tanpa dasar.
6	@trollaccountz777: Investasi? Hutang kali! Jangan diperhalus lah bahasanya. Ga akan Cuma2 ngasih duitnya. Pasti akan ada yang namanya HUTANG BUDI... Dalam bentuk apanya itu yang masih dalam tanda tanya kan? Semoga saja tidak merugikan bangsa 🙏	Ketidaksantunan negatif	Kritik langsung terhadap istilah kebijakan dengan nada kasar.
7	@haku6: Investasi itu Cuma bahasa halus aj, biar ga kelihatan banget ngutangnya 😊 kalo emng itu invest knpa ga dari dulu.. bahkan IKN aja ga ada yg mau infest 😂😂😂😂	Sarkasme atau kesantunan semu	Menggunakan sindiran untuk menyebut investasi sebagai utang tersembunyi.
8	@rizkychorniawan27: ngutang kok bangga	Ketidaksantunan secara langsung	Kritik eksplisit yang menyerang kebijakan dengan nada kasar.
9	@darmansaputra207: Oh sekarang bahasa gaul nya utang investasi ya?	Sarkasme atau kesantunan semu	Sindiran dengan nada humor untuk mempertanyakan istilah kebijakan.
10	@m_budimans: yg di bawa dari luar negeri aja 292 T padahal di negeri	Ketidaksantunan negatif	Kritik dengan nada sinis untuk

sendiri aja nyari 200 T tutup mata LUCU nya negeri ku	merendahkan alokasi anggaran dan kinerja negara.
--	--

Berdasarkan analisis tabel 1 di atas, bentuk ketidaksantunan yang paling sering muncul yaitu ketidaksantunan negatif. Banyak warganet menyampaikan komentar secara langsung merendahkan kebijakan pemerintah, seperti “@erikpriansyah13: alah ngutang banyak gaya,” sementara “@jajang_nurjaman31: Lah beda tipis ama korupsi 271 T” menuduh tanpa dasar yang jelas. Selain itu, beberapa komentar menggunakan sarkasme atau sindiran untuk menyampaikan kritik, seperti pada komentar “@adhiegr: Investasi apa pinjol? 🤔,” yang membandingkan kebijakan pemerintah dengan pinjaman online secara sarkastis. Selain itu, ketidaksantunan secara langsung seperti pada “@rizkychorniawan27: ngutang kok bangga.” yang menunjukkan kritik eksplisit dengan nada kasar.

Komentar tersebut muncul karena beberapa alasan. Salah satunya adalah skeptisisme masyarakat terhadap istilah “investasi” yang dianggap hanya berkedok utang. Banyak yang meragukan transparansi dan dampak sebenarnya dari dana Rp 294 triliun tersebut. Selain itu, rasa frustrasi terhadap pemerintah mendorong warganet untuk menyampaikan kritik secara spontan tanpa memikirkan kesopanan. Selain itu, budaya media sosial juga menjadi faktor di mana kebebasan berpendapat sering kali membuat komentar bernada kasar atau negatif lebih mudah muncul. Secara keseluruhan, komentar-komentar tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, yang diekspresikan melalui kritik tajam, sindiran, atau ejekan.

Kebijakan Kenaikan Gaji Guru

Postingan akun Instagram Folkative “**Presiden Prabowo bakal naikan gaji guru mulai bulan Januari thn 2025.**” Pada 27 November 2024, memicu diskusi hangat di kolom komentar. Kebijakan ini awalnya dipandang positif karena menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik, namun komentar warganet menunjukkan dominasi respons bernuansa kritis. Banyak pengguna Instagram menyoroti inkonsistensi janji pemerintah, sebab sebelumnya disebutkan gaji akan naik pada Oktober 2024, namun realisasinya bergeser ke Januari 2025. Selain itu, persoalan guru honorer juga memunculkan kritik yang menekankan ketidakadilan sistem penggajian. Pola komentar tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan menysar aspek penting seperti pendidikan, rendahnya kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah membuat warganet cenderung merespons dengan bahasa bernuansa ketidaksantunan.

Tabel 2. Kebijakan Kenaikan Gaji Guru

No	Komentar	Ketidaksantunan	Penjelasan
1	@grace.vioneta: yauda buktiin dulu jgn omon2 ya maren janjinya naikin oktober lo skrng kok udh geser 2025? makanya jgn bikin janji aneh2 giliran dituntut nyari banyak alasan	Ketidaksantunan secara langsung	Kritik langsung yang mempertanyakan konsistensi janji pemerintah dengan nada kasar dan tuduhan “nyari alasan”
2	@reinjt_: Aku tim menunggu bukti baru benar2 percaya. Takut kecewa. Apalagi statemenya ambigu, shg	Ketidaksantunan negatif	Menyampaikan ketidakpercayaan terhadap kebijakan dengan meremehkan

	menimbulkan banyak interpretasi.		kejelasan pernyataan pejabat.
3	@josephinekrisna: kalo bs...kalo bisa aja ya...gausah ada guru honorer. Negara lain ga ada status guru honorer. Apalagi rasio guru dan murid msh jomplang. Fix statusnya pekerja kontrak dg full time gaji atau guru dh status pegawai tetap.	Ketidaksantunan positif	Kritik yang meremehkan guru honorer di Indonesia dengan membandingkan situasi negara lain.
4	@tomy_jepisaa: Woyyy Harus banget 😭 kalau Bisa Gaji guru honorer harus dibayar seenggaknya UMR pliss	Sarkasme atau ketidaksantunan semu	Kritik eksplisit dengan nada tegas (kata "Woyyy") untuk menuntut kebijakan gaji guru honorer sesuai UMR.
5	@lucastobikeenan: PPN elu naikin jiakhhh	Ketidaksantunan negatif	Kritik tajam dengan nada kasar, menyerang kebijakan kenaikan PPN.
6	@gloooo.ry: Mang eak, drdulu pd janji doang gt	Ketidaksantunan negatif	Merendahkan kebijakan dengan menyebut janji pemerintah sebagai omong kosong (tidak terealisasi)
7	@yosinovvvvvv_: Awas aja omong doang, gua tandain	Ketidaksantunan negatif	Kritik dengan nada ancaman, menyiratkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan dan janji pejabat.
8	@fadly8366: Bagaimana pak, waktu kampanye di bilang bulan Oktober naik gaji, ini bapak bilang bulan Januari, lepas tu janji lagi kan, trimakasih bapak untuk janji manis nya.	Menahan kesantunan	Ucapan "terima kasih" tidak disampaikan secara tulus, malah menyoroti janji yang dianggap tidak ditepati.
9	@bmosnt: Nyebar hoax mulu gblok	Ketidaksantunan secara langsung	Kritik kasar dengan bahasa tidak sopan (penggunaan "gblok") dan tuduhan penyebaran informasi palsu.
10	@dinakusuma772: Heleh emang yang kerja Cuma guru doang pak 😊	Ketidaksantunan positif	Mengabaikan atau meremehkan pentingnya pekerjaan guru dengan menggunakan nada sinis dan merendahkan.

Dari analisis data tabel 2, bentuk ketidaksantunan yang sering muncul yaitu kritik negatif. Banyak komentar yang secara langsung merendahkan atau mempertanyakan kebijakan dengan nada kasar, seperti “@lucastobikeenan: PPN elu naikin jiakhhh” dan “@yosinovvvvvv_: Awas aja omong doang, gua tandain,” yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Komentar dengan nada frontal, seperti “@grace.vioneta: yauda buktiin dulu jgn omon2 ya maren janjinya naikin oktober lo skrng kok udh geser 2025?” yang mempertanyakan janji pemerintah secara keras. Selain itu, komentar sarkasme seperti “@tomy_jepisaa: Woyyy Harus banget 🤔 kalau bisa gaji guru honorer harus dibayar seenggaknya UMR pliss,” menggunakan nada sindiran untuk menuntut kebijakan yang dianggap lebih adil.

Komentar-komentar tersebut muncul karena banyak warganet merasa skeptis terhadap janji pemerintah, terutama dengan persoalan kenaikan gaji guru yang dianggap tidak konsisten. Penundaan dari Oktober ke Januari memicu rasa frustrasi, terutama di kalangan yang sudah lama menunggu realisasi janji tersebut. Selain itu, isu kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, menjadi sorotan karena dianggap belum mendapat perhatian yang layak. Di media sosial, komentar seperti ini mudah muncul karena warganet merasa bebas untuk mengekspresikan kekecewaan mereka tanpa banyak batasan. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang transparan atau tidak sesuai harapan.

Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Postingan akun Instagram Folkative “**Pak Prabowo sebut anggaran utk makan bergizi yaitu Rp 10 ribu per anak**” 30 November 2024 menimbulkan reaksi luas di media sosial. Unggahan akun Instagram Folkative terkait kebijakan tersebut segera dibanjiri komentar bernada skeptis. Sebagian besar warganet mempertanyakan kecukupan nominal Rp10.000 untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, terutama dalam konteks harga pangan dan inflasi yang terus meningkat. Di sisi lain, ada pula komentar yang menyinggung potensi penyalahgunaan anggaran dalam distribusi program. Respon warganet terhadap kebijakan ini tidak hanya berupa keraguan substantif, tetapi sering kali diwujudkan dalam bentuk ketidaksantunan berbahasa, seperti sindiran, ejekan, hingga pernyataan sinis yang merendahkan program pemerintah.

Tabel 3. Kebijakan Makan Bergizi Gratis

No	Komentar	Ketidaksantunan	Penjelasan
1	@m4sbay: serius nanya, jujur kalian makan 10 rb dapet apa?	Menahan kesantunan	Kritik yang tidak memberikan solusi, hanya berupa ejekan.
2	@kusheri_yayan: Wo Wo, gaji guru nangis tau2nya naik cm yg sertifikasi itupun 500 rb dibanding inflasi mah kaga nutup, ini lg 10 rb Jkt dpt apaan selain gorengan 6? Belum disunat/dikorupnya	Ketidaksantunan negatif	Kritik tajam terhadap prioritas anggaran dengan nada kasar dan merendahkan.
3	@afaiyaway: Pusat kasih 10k sampe provinsi 8 k sampe kab/kota sisa 6 k sampe vendor sisa 4 k smpe sekolah sisa 2 k (lumayan dapet roma gandum saset)	Menahan kesantunan	Kritik distribusi anggaran tanpa memberikan solusi konkret.

4	@ulann : mending gk usah klo 10rb doang dapat apa jir	Ketidaksantunan secara langsung	Kritik tajam terhadap kebijakan dengan nada kasar.
5	@shantyo_raharjo: Aneh.. presiden menyalurkan bantuan makan siang gratis atas nama pemerintah. Sedangkan pak fufufafa menyalurkan bantuan atas nama bantuan wapres. 😂😂😂	Sarkasme atau kesantunan semu	Menggunakan humor untuk merendahkan kebijakan dengan perbandingan.
6	@pira_hellas: Makasi pak Alhamdulillah anak2 kami jadi kurang gizi	Sarkasme atau kesantunan semu	Sindiran tentang efektivitas anggaran dalam memenuhi kebutuhan gizi.
7	@alergi_iklan: SEBERGIZI APA UANG 10k?	Ketidaksantunan secara langsung	Kritik eksplisit dengan nada mempertanyakan efektivitas kebijakan.
8	@eyaaye_yay: Program g jelas, buang2 anggaran, padahal masih banyak program2 yg lebih bermanfaat	Ketidaksantunan negatif	Kritik terhadap kebijakan tanpa memberikan saran konkret atau solusi.
9	@nantoutom: Sdhlah gak usah dipaksakan wow....program kamu itu nguras APBN	Ketidaksantunan negatif	Kritik tajam merendahkan kebijakan sebagai pemborosan anggaran.
10	@arjuna_kel: Stop aja, hentikan aja program makan siang gratis itu. Itu tidak dibutuhkan dan kurang efektif. Jadikan anggarannya untuk pendidikan gratis dan kualitas pendidikan yg lebih bermanfaat untuk kehidupan. Makan gratis bisa mmbuat orang malas.	Ketidaksantunan secara langsung	Kritik eksplisit yang menyatakan ketidaksetujuan dengan nada keras.

Berdasarkan analisis tabel 3, bentuk ketidaksantunan yang paling sering muncul yaitu Ketidaksantunan negatif. Banyak komentar yang secara langsung merendahkan atau mempertanyakan kebijakan dengan nada kasar, seperti *"Semiskin apa sihh kita smp urusan mkn pun kita ngutang. Klo gk sanggup ya gk usah bikin program"* dan *"Pusat kasih 10k sampe provinsi 8 k smpe kab/kota sisa 6 k smpe vendor sisa 4 k smpe sekolah sisa 2 k (lumayan dapet Roma Gandum saset),"* yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ada juga komentar dengan nada frontal, seperti *"Mending gk usah klo 10rb doang dapat apa jir,"* yang menolak kebijakan secara eksplisit. Selain itu, komentar sarkasme seperti *"Makasi pak Alhamdulillah anak2 kami jadi kurang gizi"* menggunakan nada sindiran untuk mengkritik efektivitas kebijakan.

Komentar-komentar tersebut muncul karena banyak warganet merasa skeptis terhadap kebijakan makan bergizi gratis, terutama terkait nominal Rp 10 ribu yang dianggap tidak realistis untuk kebutuhan gizi anak. Ketidakpercayaan terhadap distribusi anggaran juga memicu kekecewaan, karena dianggap tidak transparan dan rawan

korupsi. Di media sosial, komentar seperti ini mudah muncul karena warganet merasa bebas untuk mengekspresikan kekecewaan mereka tanpa banyak batasan. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang jelas atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan analisis ketidaksantunan berbahasa terhadap tiga kebijakan yang diteliti, yaitu kebijakan investasi dari luar negeri, kenaikan gaji guru, dan makan bergizi gratis, dapat disimpulkan bahwa ketidaksantunan negatif mendominasi dalam komentar warganet di Instagram Folkative. Ketidaksantunan negatif ini mencakup kritik langsung, sarkasme, dan nada merendahkan yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Kecenderungan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat skeptisisme yang kuat terhadap transparansi dan efektivitas kebijakan, seperti dalam kebijakan investasi yang dianggap sekadar utang berkedok investasi. Kedua, janji pemerintah yang tidak konsisten, seperti pada kenaikan gaji guru, memicu frustrasi dan ketidakpercayaan publik. Ketiga, nominal atau rencana kebijakan yang dianggap tidak realistis, seperti anggaran Rp10 ribu untuk makan bergizi, memicu kritik tajam terkait implementasi kebijakan.

Media sosial sebagai platform yang bebas dan minim batasan juga menjadi medium yang memfasilitasi ekspresi ketidakpuasan secara langsung, sering kali tanpa memperhatikan etika komunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang didengar oleh pemerintah sehingga mereka menggunakan media sosial untuk menyuarakan kritik mereka secara terbuka. Kecenderungan ini memperlihatkan dinamika komunikasi digital yang mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan, tidak konsisten, atau tidak realistis. Ketidakpuasan dipicu oleh rasa frustrasi terhadap ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan kenyataan di lapangan, serta terbatasnya ruang bagi warganet untuk menyampaikan pendapat mereka secara lebih formal.

Simpulan

Hasil analisis, ditemukan bahwa komentar-komentar pada unggahan akun Instagram Folkative terkait kebijakan Prabowo Subianto didominasi oleh bentuk ketidaksantunan negatif, yang ditandai dengan kritik langsung, sarkasme, dan nada merendahkan. Bentuk ketidaksantunan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain skeptisisme masyarakat terhadap transparansi dan efektivitas kebijakan, ketidakpuasan terhadap janji pemerintah yang dianggap tidak konsisten, serta anggapan bahwa nominal kebijakan tersebut tidak realistis.

Selain itu, kebebasan berekspresi di media sosial turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat ketidaksantunan dalam komentar, karena warganet merasa leluasa menyampaikan ketidakpuasan tanpa memperhatikan etika komunikasi. Kondisi ini mencerminkan adanya celah dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran untuk berkomunikasi secara santun di media sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan dua hal penting. Pertama, komentar warganet merupakan representasi opini publik yang tidak boleh diabaikan, meskipun disampaikan dengan cara yang tidak santun. Kedua, diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran etika berbahasa agar ruang diskusi daring tidak hanya menjadi

wadah kritik, tetapi juga forum komunikasi yang sehat, produktif, dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andi Saadillah, Andi Haryudi, Muhammad Reskiawan, & Alam Ikhsanul Amanah. (2023). Penggunaan Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), 1437–1447. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2367>
- Aviva, A. J., & Mulyani, W. (2022). Ragam Tulis Bahasa Gaul Dalam Kolom Komentar Media Sosial Instagram Lambe Turah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 578–585. <http://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM>
- Irawati. (2023). *Strategi ketidaksantunan sarkasme warganet pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo Netizens ' sarcasm impoliteness strategy in Ganjar Pranowo ' s Instagram comment column Pendahuluan Penggunaan bahasa dalam media digital dewasa ini mempengaruhi cara*. 6, 911–930.
- Marzella, Rizal, K. (2024). *Journal of Sciencetech Research and Development USE OF Instagram As A Media For Disseminating Information On*. 6(1), 1929–1950.
- Muhammad, R. N., S, L. W., & Tanggahma, B. (2024). *Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan : Analisis Sentimen di Twitter*. 7(1), 507–516.
- Ratnawati. (2023). *Strategi Ketidaksantunan Berbahasa Pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram Akun Detikcom* : 19–32.
- Rizal Sukandi, Irwan Siagian, & Nadya Maharani. (2022). Analisis Kesantunan Berbahasa Pada Media Instagram (Kajian Pragmatik). *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(1), 137–155. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.8369>
- Shafari, Mardiningsing, R. (2020). *Kesantunan Berbahasa Pada Kolom Komentar Di Akun Twitter Prabowo Subianto: Kajian Pragmatik*. 01(02), 56–62.
- Siregar, A. R., Harahap, A., & Nasution, M. S. (2024). *Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth*. 5(1), 39–53.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>
- Wildan, M. (2023). Sentimen negatif netizen dalam kolom komentar detik.com terhadap pemberitaan kasus Ferdy Sambo. *Litera*, 22(1), 26–39. <https://doi.org/10.21831/ltr.v22i1.57870>
- Wulandari, Y. (2016). Analisis Bentuk Pelanggaran Maksim Tuturan Tokoh Cerpen Harga Seorang Perempuan Karya Oka Rusmini Sebagai Materi Otentik Pembentukan Karakter. *Jurnal Buana Bastra*, 1, 1–114.
- Yusuf, & Ahmadi. (2022). Kampanye Budaya Beres di Media Sosial Instagram. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 151–158. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v2i2.1530>